

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pada bab ini, peneliti menyimpulkan dari hasil penelitian lapangan yang didapatkan oleh peneliti dan memberikan rekomendasi kepada pihak yang bersangkutan dengan partisipasi politik purnawirawan TNI dan POLRI di Kabupaten Tegal. Dengan demikian, peneliti sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Partisipasi politik purnawirawan TNI dan POLRI di Kabupaten Tegal dalam aspek Pemilu menunjukkan purnawirawan yang tergabung di DPC PEPABRI Kabupaten Tegal yang menjadi narasumber masuk kategori partisipasi aktif dengan mayoritas terlibat melalui Hari Pemungutan Suara pada Pemilu. Artinya, para purnawirawan berpartisipasi politik dalam bentuk konvensional. Hasil penelitian ini menunjukkan mayoritas partisipasi politik purnawirawan TNI dan POLRI di Kabupaten Tegal dalam Pemilu tergolong pada level Pengamat (*Spectator*). Oleh karena itu, partisipasi politik purnawirawan TNI dan POLRI di Kabupaten Tegal secara umum menunjukkan antusiasme dan rasionalitas berangkat dari kesadaran pribadi memanfaatkan hak politik sebagai warga sipil dalam bentuk penggunaan hak suara saat Pemilu.
2. Partisipasi politik purnawirawan TNI dan POLRI Kabupaten Tegal di luar Pemilu masuk pada kelompok Partisipan (*Gladiator*). Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan purnawirawan seperti:
 - a) Menjadi Ketua Lembaga Kemasyarakatan seperti RT, LPMD dan BPD.

b) Bergabung ke dalam organisasi masyarakat bidang sosial seperti PEPABRI, PP POLRI, PP AD, PP AL, PP AU, DHC 45 dan LVRI. Seluruh organisasi tersebut tidak ditunggangi kepentingan politik, memiliki komitmen untuk turut aktif berpartisipasi dalam pembangunan nasional, dan orientasi terhadap kepentingan bangsa.

c) Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Kabupaten Tegal

Tampaknya eksistensi purnawirawan TNI dan POLRI di lembaga kemasyarakatan, organisasi masyarakat dan partai politik sangat diperhitungkan. Modal sosial purnawirawan membuat masyarakat percaya untuk ditempatkan pada posisi strategis kepengurusan agar mampu berkontribusi dan memaksimalkan peran organisasi. Ormas dimanfaatkan purnawirawan sebagai sarana menyalurkan aspirasi dan menjadi pilihan untuk berpolitik tanpa terlibat dalam politik praktis. Sehingga, para purnawirawan memiliki bentuk partisipasi politik aktif.

3. Dalam menjalankan partisipasi politiknya, purnawirawan TNI dan POLRI di Kabupaten Tegal menunjukkan perilaku yang sesuai aturan demokrasi dan tidak bersikap antipati terhadap demokrasi. Meskipun tidak diperbolehkan bergabung dengan organisasi masyarakat selama masa dinas, lantas tidak membuat purnawirawan apatis terhadap perkembangan politik setelah memasuki masa purna. Para purnawirawan tidak menunjukkan perilaku-perilaku menyimpang yang berada dalam bentuk partisipasi non konvensional seperti demo, konfrontasi, tindakan kekerasan dll. Hal ini tidak terlepas dari wawasan kebangsaan dan jiwa pejuang yang menganut politik negara dengan menjaga

keutuhan NKRI, berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan menegakkan konstitusi sebagai satu-satunya aturan yang sah.

4.2 Saran

Bagi Pemerintah:

1. PEPABRI sebagai organisasi masyarakat yang memiliki peran strategis ternyata memiliki kontribusi terhadap partisipasi politik. Akan tetapi, PEPABRI memiliki kendala terhadap anggaran dan sarana pra sarana dalam menjalankan internal organisasi sebab hanya mengandalkan iuran anggota saja. Maka dari itu, pemerintah perlu memberi perhatian khusus berupa bantuan dana hibah yang rutin agar aktivitas operasional organisasi dapat berjalan dengan lancar.
2. Badan Kesbangpol diharapkan dapat melakukan pembinaan organisasi masyarakat secara rutin dan memaksimalkan peranan organisasi masyarakat sebagai kekuatan moral agar bermanfaat bagi warga Kabupaten Tegal.

Bagi Organisasi PEPABRI:

1. Partisipasi purnawirawan TNI dan POLRI di Kabupaten Tegal sangat dibutuhkan demi menyukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Dengan demikian, PEPABRI sebagai organisasi masyarakat perlu membangun koordinasi, sinergi dan harmoni dengan KPU dalam rangka meningkatkan partisipasi Pemilu. PEPABRI sebagai organisasi masyarakat hendaknya proaktif dan bekerjasama dengan KPU untuk meminimalisir faktor-faktor yang menjadi kendala atau hambatan bagi purnawirawan TNI dan POLRI dalam menggunakan hak pilihnya saat Pemilu. Purnawirawan tergolong pemilih pemula karena belum pernah memiliki pengalaman sebagai pemilih dalam Pemilu sehingga

diperlukan sosialisasi oleh KPU untuk menambah wawasan kepemiluan bagi purnawirawan.

2. PEPABRI perlu membangun kerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam rangka meningkatkan integritas Pemilu.

Bagi Purnawirawan (secara individu):

1. Purnawirawan diharapkan menjaga harkat dan martabat TNI POLRI dengan tetap dalam mendukung demokrasi, mempertahankan NKRI, ideology Pancasila demi menghalau ajaran radikalisme. Diharapkan partisipasi politik secara aktif senantiasa diorientasikan pada kepentingan bangsa serta saling mengingatkan untuk menjaga integritas dan etika purnawirawan dalam organisasi. Selain itu, tetap teguh menjaga netralitas di organisasi yang diikuti juga senantiasa peka dan peduli terhadap perkembangan politik.
2. Purnawirawan disarankan untuk tidak mengeksploitasi pengalaman militer atau kepolisian mereka untuk kepentingan politik praktis. Penggunaan simbol-simbol atau atribut militer/kepolisian dalam konteks politik yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Alangkah baiknya mengaplikasikan ilmu, keterampilan, wawasan dan nilai-nilai positif yang didapat dari instansi sebelumnya bekerja ke dalam organisasi atau lingkungan sekitar demi menjaga persatuan dan kesatuan kehidupan berbangsa dan bernegara.